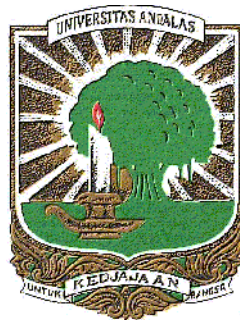


**ANALISIS AKSES PETANI TERHADAP LAHAN CETAK
SAWAH BARU PADA PROGRAM PERLUASAN LAHAN
SAWAH DI KENAGARIAN TAPAKIS KEC. ULAKAN
TAPAKIS KAB. PADANG PARIAMAN**

OLEH

SYAHRIAL
07 114 018



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ANALISIS AKSES PETANI TERHADAP LAHAN CETAK SAWAH BARU PADA PROGRAM PERLUASAN LAHAN SAWAH DI KENAGARIAN TAPAKIS KEC. ULAKAN TAPAKIS KAB. PADANG PARIAMAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan akses petani terhadap Program Perluasan Lahan Sawah dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan perolehan luas lahan antar masing-masing petani peserta pada program sawah cetakan baru di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2011.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Responden dalam penelitian ini adalah kelompok tani peserta program perluasan lahan sawah tahun anggaran 2009 sebanyak 30 % dari 123 orang yang terbagi dalam 3 kelompok tani dengan cara *Stratified Random Sampling* dan petani non peserta sebanyak 30 orang. Data dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Perluasan Lahan Sawah di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dapat diakses oleh petani yang merupakan keluarga *saparuik* dalam suku Chaniago sebagai pemegang hak ulayat. Petani lain yang bisa bergabung dalam program ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dengan suku Chaniago yaitu mereka yang memiliki hubungan karena pernikahan dua keluarga. Disamping itu, petani yang bergabung dalam program juga telah memenuhi persyaratan yang diajukan pemerintah seperti memiliki luas lahan yang kecil sebelum program, petani yang telah bergabung dalam anggota kelompok penerima progra serta petani yang membutuhkan lahan sebagai pendapatan utama keluarga. Sebagian anggota kaum Chaniago yang seharusnya mengelola tanah ulayat mereka ternyata tidak ikut berpartisipasi dalam Program Cetak Sawah Baru. Hal ini disebabkan antara lain: sebagian anggota kaum Chaniago mememiliki pekerjaan utama tidak sebagai petani, sebagian dari anggota kaum Chaniago telah pergi merantau ke daerah lain, sebagian anggota kaum Chaniago telah memiliki lahan lain yang sudah diolah. Selain itu tingkat produktivitas lahan bukaan baru juga masih rendah sehingga turut berpengaruh pada minat petani untuk menggarap lahan tersebut. Bertolak dari hal tersebut, maka diberilah kesempatan bagi petani lain di luar kaum Chaniago untuk menggarap tanah mereka dengan status sebagai petani penggarap.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini sektor pertanian tetap dijadikan sebagai sektor andalan, karena sektor ini telah terbukti tetap bertahan dari badai krisis moneter, sementara itu sektor- sektor lainnya justru banyak yang mengalami kebangkrutan. Peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain sebagai penyedia lapangan kerja (sumber mata pencaharian penduduk), sumber devisa negara, sumber bahan baku industri, dan sumber pendapatan nasional. Selain itu, sektor pertanian juga merupakan sumber bahan pangan bagi sebagian besar penduduk Indonesia (Supriyati, 2005).

Sumberdaya lahan adalah sumberdaya strategis dari setiap sektor perekonomian. Seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, kebutuhan lahan untuk membangun prasarana ekonomi, prasarana sosial, dan pemerintahan meningkat terus dari tahun ke tahun. Kompetisi penggunaan lahan antar sektor semakin ketat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Pada tahun 2006 luas lahan sawah di Indonesia adalah sekitar 7,89 juta hektar, dimana 3,24 juta hektar (41,1 persen) diantaranya berada di Pulau Jawa, sementara di Luar Pulau Jawa seluas 4,56 juta hektar yang diantaranya seluas 2,34 juta hektar (50,3 persen) berada di Pulau Sumatera. Data menunjukkan bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk berbagai sektor, konversi lahan cenderung mengalami peningkatan, di lain pihak pencetakan lahan sawah baru (ekstensifikasi) mengalami perlambatan (Direktorat Pangan dan Pertanian, 2010).

Penguasaan lahan mengacu pada pemilikan dan penggarapan. Dalam berusahatani, sebagian besar petani menggarap miliknya sendiri. Namun, tidak sedikit pula yang lahan garapannya adalah milik orang lain dengan cara menyewa, bagi hasil, menggadai, dan sebagainya. Mereka adalah petani yang tidak memiliki lahan sendiri ataupun jika memiliki lahan sendiri luasnya relatif sangat kecil untuk digarapnya. Bahkan ditemukan pula kasus-kasus petani yang menyewa atau

menyakap (bagi hasil) lahannya sendiri yang telah digadaikan atau disewakan secara tahunan kepada orang lain.

Gambaran tentang distribusi pemilikan yang didefinisikan sebagai *sub set* dari penguasaan lahan dapat disimak dari sebaran rumah tangga menurut kelompok pemilikan. Tampak bahwa jumlah petani dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar ke bawah adalah sekitar 44 persen. Pada kelompok ini, jumlah terbanyak adalah pada luasan seperempat hektar ke bawah sebesar 27 persen, sedangkan petani tunakisma (tidak memiliki lahan sendiri sehingga menggarap milik orang lain) adalah sekitar 9 persen. Di Pulau Jawa, jumlah petani yang luas pemilikannya 0,5 hektar ke bawah mencapai 57 persen, sedangkan di Luar Pulau Jawa sekitar 37 persen. Demikian pula dengan petani penggarap murni, di Pulau Jawa mencapai 12 persen sedangkan di Luar Pulau Jawa sekitar 7 persen. Secara umum distribusi pemilikan lahan usahatani di Indonesia berada pada tingkat ketimpangan sedang (indek gini berkisar 0,42 – 0,64) dan dalam sepuluh tahun terakhir ini cenderung semakin timpang (Sudaryanto dan Agustian, 2009).

Berdasarkan pertimbangan obyektif yang didukung berbagai hasil penelitian empiris diperoleh kesimpulan bahwa untuk mendukung tingkat pertumbuhan produksi pangan di Indonesia perlu adanya perluasan areal pertanian baru. Alasannya: (i) laju pertumbuhan produktivitas mengalami gejala kemandegan, (ii) alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain belum berhasil ditekan sampai ke tingkat minimal, (iii) antisipasi terhadap penyusutan lahan pangan karena naiknya paras muka laut akibat pemanasan global; dan (iv) untuk mendukung perbaikan skala penguasaan garapan usahatani sehingga pendapatan petani meningkat (Direktorat Pangan dan Pertanian, 2010).

Perluasan lahan pertanian didefinisikan sebagai pendayagunaan sumberdaya lahan atau perubahan penggunaan sumberdaya lahan (*land use change*) dari semula bukan lahan pertanian menjadi lahan pertanian sehingga luas baku lahan pertanian meningkat. Sumberdaya lahan yang dapat didayagunakan untuk perluasan areal pertanian dapat berupa tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang semula tidak diusahakan atau tidak didayagunakan

untuk pertanian yang berdasarkan peruntukannya menurut perundang-undangan dapat didayagunakan untuk pertanian.

Lahan merupakan sumberdaya yang sangat strategis; baik dari sudut pandang ekonomi, politik, hukum, maupun keamanan nasional. Oleh karena itu isu-isu dan permasalahan yang dihadapi dalam perubahan pendayagunaan sumberdaya lahan – termasuk perluasan lahan pertanian – sangat kompleks. Hasil identifikasi memperoleh kesimpulan bahwa isu-isu permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait perluasan areal pertanian adalah: (i) Status hukum mengenai kepemilikan/penguasaan lahan sebelum dan sesudah lahan tersebut dikonversi menjadi areal pertanian baru. (ii) Kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan akses petani terhadap lahan. Substansi utamanya berkenaan dengan aspek keadilan dan efisiensi; dan hal ini terkait dengan butir (i) tersebut di atas (Direktorat Pangan dan Pertanian, 2010).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Program Perluasan Lahan Sawah di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman dapat diakses oleh petani yang memiliki luas lahan yang kecil sebelum program, petani yang telah bergabung dalam anggota kelompok penerima program, petani yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Dt. Rky. Malako dan/ ketua kelompok tani serta petani yang membutuhkan lahan sebagai pendapatan utama keluarga. Sebanyak 52,63 persen petani anggota program merupakan petani yang memiliki lahan kecil dari 1 Ha, 100 persen petani peserta program telah bergabung dalam keanggotaan kelompok tani penerima jatah program cetak sawah baru, sebanyak 65,79 persen peserta memiliki hubungan kekerabatan dengan Dt. Rky. Malako dan/ ketua kelompok tani, serta 100 persen petani peserta membutuhkan lahan sebagai sumber pendapatan utama keluarga. Sebagian anggota kaum Chaniago yang seharusnya mengelola tanah ulayat mereka ternyata tidak ikut berpartisipasi dalam Program Cetak Sawah Baru. Hal ini disebabkan antara lain: sebagian anggota kaum Chaniago mememiliki pekerjaan utama tidak sebagai petani, sebagian dari anggota kaum Chaniago telah pergi merantau ke daerah lain, sebagian anggota kaum Chaniago telah memiliki lahan lain yang sudah diolah. Selain itu tingkat produktivitas lahan bukaan baru juga masih rendah sehingga turut berpengaruh pada minat petani untuk menggarap lahan tersebut. Bertolak dari hal tersebut, maka diberilah kesempatan bagi petani lain di luar kaum Chaniago untuk menggarap tanah mereka dengan status sebagai petani penggarap.

Faktor penyebab perbedaan luas lahan garapan antar masing-masing petani pada program sawah cetakan baru di Kenagarian Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman hanya di pengaruhi oleh sumber pembiayaan petani, dimana 83,33 persen petani yang menggarap lahan luas pada program memakai sumber pembiayaan usaha tani sendiri dan sebanyak 71,05 persen petani yang berlahan sempit memakai sumber biaya usahatani pinjaman. Ternyata hubungan jumlah TKDK dan hubungan kekerabatan antara petani dengan ketua

kelompok tani dan Dt. Rky. Malako tidak mempengaruhi ukuran luas lahan garapan yang di dapat pada program cetak sawah baru.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meskipun secara umum petani yang telah bergabung sebagai anggota merupakan petani yang membutuhkan lahan, namun sebaiknya identifikasi calon petani penerima program dilakukan terhadap petani lain yang belum bergabung dalam keanggotaan kelompok tani. Hal ini memberikan peluang positif bagi petani non anggota poktan yang membutuhkan lahan untuk mendapatkan kesempatan sebagai penerima program cetak sawah baru.
2. Sebaiknya pemerintah, kaum pemegang ulayat dan petani peserta program cetak sawah baru membuat perjanjian yang jelas tentang status lahan setelah program cetak sawah baru agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Berlo, D.K. 1960. *The Process of Communication: An Introduction to Theory and Practice*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Prenada Group: Jakarta.
- Chambers, R. 1987. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Terjemahan LP3ES. Jakarta.
- Chitambar, J.B. 1972. *Introductory Rural Sociology*. Willy Eastern Limited. New Delhy.
- Collier, W.L, Santoso, K., Soentoro, dan Wibowo, R. (1996). *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Tahun*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pertanian dan Hortikultura. 2006. *Pedoman Umum Proyek Ketahanan Pangan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pengolahan Lahan dan Air. 2009. *Perluasan Areal Tanaman Pangan Perluasan Lahan Sawah*. Kementrian Pertanian Republik Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Pangan dan Pertanian. 2010. *Rencana Kebijakan Strategis Perluasan Areal Pertanian Baru Dalam Rangka Mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan*. BAPPENAS. Jakarta.
- Hakim, Nurhajati. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*: Jakarta
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53. 1980. *Kebijakan Mengenai Pencetakan Sawah*. <http://www.google.com> [diakses 02 Januari 2011]
- Koetjaraningrat (Ed). 1964. *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Kini*. Jajasan Badan Penerbit FEUI. Jakarta.
- Mardikanto, Totok. 1992. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Moleong, Lexy J.Dr, M, A. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Persada. Bandung.
- Mubyarto. 1994. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta

- Munasinghe, M. 1993. *Environmental Economics and Sustainable Development. World Bank Environmental Paper No. 3. Hubungannya Dengan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian dalam Kasryno, et al (Penyunting) Prosiding Patanas: Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Badan Litbang Pertanian.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode penelitian*. Ghalian Indonesia. Bogor.
- Parikesit. 2003. *Integrated Rural Accessibility Planning*. UGM. Yogyakarta.
- Purwasito, A. 2003. *Komunikasi Multikultural*. Muhamadiyah University Press, Yogyakarta.
- Rogers, E.M. 1960. *Social Change In Rural Society, A Textbbok In Rural Sociology*. Appleton Century Graft Inc. New York.
- Setiawan, Iwan. 2006. *Analisis Desa-desa di Kabupaten Bandung Terhadap Sumber-sumber Produktif*. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Sinukaban, Naik. 2005. *Revitalisasi Pembangunan Pertanian* <http://www.kompas.com> [diakses 2 Januari 2011]
- Sitorus. 2001. *Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Lahan dan Air*. Penerbit Andi. Jakarta.
- Soekanto, S. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit CV Rajawali. Jakarta.
- Sudaryanto , T dan A. Agustian. 2009. *Peningkatan Daya Saing Usahatani Padi: Aspek Kelembagaan*. AKP Vol. 1(3):255-274. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Sudjana. 1982. *Metode Statistika*. Penerbit Tarsito. Bandung
- Supriyati. 2005. *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Pertanian dan Komoditas Pertanian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Bogor.
- Tubbs, S.L dan S. Moss. 1996. *Human Communication: Prinsip-Prinsip Dasar*. PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Usman, Husnani dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wihardjaka, A., dan A.K. Makarim. 2001. *Emisi Gas Metan Melalui Bebrapa Varietas Padi Pada Tanah Incepticol Yang Disawahkan*. Penelitian Pertanian Tanaman Pangan Vol. 20:1. p 10-15. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.